

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan pilar utama untuk mewujudkan otonomi daerah yang sehat. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang yang luas terhadap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Diterapkannya kebijakan otonomi daerah disebabkan ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengurus keseluruhan pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah pusat melimpahkan wewenang dan kekuasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola dengan mandiri semua kebutuhan daerahnya (Nkomah et al., 2016). Keberhasilan otonomi daerah dilihat dari pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien (Musdirohmah & Sahri, 2022). Kebijakan otonomi daerah mengharuskan daerah untuk mengelola keuangan daerah yang diperoleh secara mandiri untuk kegunaan pembangunan daerah N. M. D. P. Sari & Mustanda, (2019).

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan yang mampu mengawasi dan

mengatur keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel (Mardismo, 2009:18).

Kinerja Keuangan Daerah menjadi indikator krusial dalam mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangannya. Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah efektivitas keuangan daerah, yang mengukur kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan yang di rencanakan dibanding dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ulum, 2012). Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang ada didaerahnya sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerahnya (Musdirohmah & Sahri, 2022).

Kinerja keuangan Daerah merupakan Tingkat pencapaian sebuah daerah dalam mengenali dan memanfaatkan semua sumber daya asli daerahnya, guna mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya terhadap dana dari pemerintah pusat serta dapat mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam ssssmenggunakan atau memanfaatkan dana untuk kepentingan daerah dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam perundang undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaanya kecenderungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat merupakan fenomena umum yang sering terjadi. Ketergantungan

ini mengakibatkan peningkatan ketergantungan fiskal, dimana semakin besar dana transfer dari pusat yang diterima, pemerintah daerah kurang berupaya dalam menggali pendapatan asli daerah, kurangnya upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak langsung pada penurunan efektivitas keuangan pemerintah daerah karena rasio efektivitas mengukur kemampuan daerah dalam mencapai target penerimaan PAD.

Fenomena terkait kinerja keuangan pemerintah kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat adalah masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Diikuti dengan adanya fluktuasi pada efektivitas keuangan daerah selama periode 2021-2023.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Data Diolah)

Gambar 1.1
Tingkat Ketergantungan

Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat ketergantungan yang konsisten tinggi, yaitu sekitar 68,05% pada tahun 2021, meningkat menjadi 71,7% pada 2022, dan sedikit di atas 71,73% pada tahun 2023. Ini mengidentifikasi bahwa lebih dari setengah total pendapatan provinsi Jawa Barat berasal dari dana perimbangan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah seperti ukuran pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah.

Ukuran Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah karena Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu pula sebaliknya apabila ukuran daerah kecil maka dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka akan memperoleh kelancaran dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (A. Aziz, 2016).

Ukuran daerah seringkali diukur melalui total aset yang dimiliki oleh suatu daerah (N. M. D. P. Sari & Mustanda, 2019). Ukuran daerah merupakan besar kecilnya suatu daerah yang bisa diukur menggunakan total asetnya (Ade Noviyanti et al., 2016), aset tersebut dapat digunakan sebagai indikator ukuran pemerintah daerah.

Menurut Aulia dan Rahmawati (2020) ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah yang ditandai semakin besarnya total aset pemerintah daerah semakin besar peluang pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional daerahnya dan memenuhi kewajiban daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (I. P. Sari, 2016) dan (Adinata & Efendi, 2022) Artinya ukuran

pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan guna meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Putri & Amanah, 2020) Rizky dan Sari & mustanda (2019) menemukan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Ade Noviyanti et al., 2016) dan (Anggraini et al., 2019) menyatakan Ukuran Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang dapat dilihat dari besarnya dana perimbangan yang diterima dari pusat (Aulia & Rahmawaty, 2020). Dana perimbangan adalah sumber pendapatan lain yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan daerah dimana dana yang diterima daerah akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung terhadap pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Semakin besar tingkat ketergantungan dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019), dan (Meilanda et al., 2023). Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Ade Noviyanti et al., 2016), (Anggraini et al., 2019) dan (Setiani & Ismunawan, 2022). menemukan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian

lain yang dilakukan oleh (Aulia & Rahmawaty, 2020) menyatakan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena sebagian besar dana dipakai untuk belanja rutin aparatur daerah yang mengakibatkan tidak tersedianya dana untuk pelayanan publik dan menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan dana perimbangan.

Terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu terdapat gap penelitian yang menarik untuk diteliti kembali mengenai ukuran daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian ini Kota/kabupaten di Jawa Barat telah dipilih sebagai fokus penelitian karena tingginya tingkat ketergantungan yang ada yang diukur melalui dana perimbangan terhadap total pendapatan, dan adanya fluktuasi pada rasio kinerja keuangan daerah yang menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu Judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Daerah dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di kota/kabupaten di Jawa Barat periode 2021-2023”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran Daerah, Tingkat Ketergantungan, dan Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023?

2. Bagaimana pengaruh Ukuran Daerah, dan Tingkat Ketergantungan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023?
3. Bagaimana Pengaruh Ukuran Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Ketergantungan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ukuran Daerah dan Tingkat Ketergantungan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Daerah dan Tingkat Ketergantungan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023

4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis harapan dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya untuk membahas pengaruh ukuran daerah dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan daerah.

2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran daerah dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan daerah kota/kabupaten di Jawa Barat.

3. Bagi Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam mengambil kebijakan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat.

4. Bagi pihak lain

Diharapkan menjadi bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap masalah yang serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat dari tahun 2021 sampai 2023. Adapun data keuangan dapat diakses pada halaman resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan, mulai bulan mei hingga juli 2025 untuk lebih jelasnya di sajikan pada lampiran 1.